

**RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI TEMATIK PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2023**

No.	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi (Program Kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat)	Output		Target 2023					Jenis Kegiatan Aksi* (terkait atau tidak terkait langsung dengan masyarakat/ stakeholder utama)	Anggaran (Rp)	Pelaksana	
						Satuan	Indikator	TW 1	TW II	TW III	TW IV	Total			Instansi Koordinator	Instansi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Tema Pengentasan Kemiskinan</b>																
1	Masih rendahnya Pemahaman Pelaku Usaha Mikro dan Kecil tentang tata kelola manajemen usaha, mutu produk, akses pemasaran, akses permodalan dan jumlah umkm yang berbadan usaha.	Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	Prosentase Volume Usaha kecil yang meningkat	1.47%	Pelatihan UMKM	Pelaku UMKM	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan UMKM							Terkait Langsung DAU (Rp. 228.382.200) DAK (Rp. 1.006.661.967)	BAPPEDA	Dinas Koperasi UKM

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI TEMATIK PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2023

No.	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi (Program Kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat)	Output		Target 2023					Jenis Kegiatan Aksi* (terkait atau tidak terkait langsung dengan masyarakat/ stakeholder utama)	Anggaran (Rp)	Pelaksana					
						Satuan	Indikator	TW 1	TW II	TW III	TW IV	Total			Instansi Koordinator	Instansi Pelaksana				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
<b>Tema Peningkatan Investasi</b>																				
1	Masih rendahnya Koperasi bergerak di Sektor Jasa Keuangan yang memiliki Ijin Usaha Simpan Pinjam	Meningkatnya pelayanan izin usaha simpan pinjam	Prosentase Meningkatnya koperasi Bergerak di Bidang Sektor Jasa Keuangan yang memiliki ijin usaha simpan pinjam	91.25%	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam	Izin	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	2	3				5	terkait langsung dengan masyarakat/ stakeholder utama	75,154,000	DPMPTSP	DPMPTSP			
							Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan Fasilitasi	38	38				76							
							Jumlah Koperasi yang difasilitasi	19	19				19							
						Koperasi	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2	3			5					terkait langsung dengan masyarakat/ stakeholder utama	49,999,800	Dinas Koperasi, UKM
								Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan Fasilitasi	50				50							
								Jumlah Koperasi yang difasilitasi	25				25							
2	Masih rendahnya omzet koperasi	Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Prosentase Koperasi yang meningkat jumlah Omzet	5%	Incubator Bisnis Koperasi dan UKM	Koperasi	Jumlah Koperasi diberdayakan			60		60	terkait langsung dengan masyarakat/ stakeholder utama	631,135,200	Dinas Koperasi, UKM	Dinas Koperasi, UKM				
							Jumlah Koperasi diberdayakan		60		60									
3	Masih rendahnya volume usaha pelaku usaha kecil	Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Menengah,Usaha Kecil dan Usaha Mikro	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha	1.47%	Temu Mitra Pengembangan dan Penguatan Koperasi Temu Bisnis Peningkatan Kerjasama Investasi UMKM	Koperasi	Jumlah Koperasi diberdayakan		60			60	terkait langsung dengan masyarakat/ stakeholder utama	66,521,000	Dinas Koperasi, UKM	Dinas Koperasi, UKM				
							Jumlah Usaha Kecil diberdayakan	30			30									
		Meningkatnya Pengembangan Usaha Kecil	Prosentase Peserta Pelatihan UMKM yang Meningkatkan Pemahamannya	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Pelaku UMKM	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum					120	120	terkait langsung dengan masyarakat/ stakeholder utama	323,264,933	Dinas Koperasi, UKM					

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI TEMATIK PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2023

No.	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi (Program Kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat)	Output		Target 2023					Jenis Kegiatan Aksi* (terkait atau tidak terkait langsung dengan masyarakat/stakeholder utama)	Anggaran (Rp)	Pelaksana	
						Satuan	Indikator	TW 1	TW II	TW III	TW IV	Total			Instansi Koordinator	Instansi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Tema Peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)</b>																
	Masih rendahnya omzet koperasi	Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Prosentase Koperasi yang meningkat jumlah Omzet	5%	Pengembangan Usaha Koperasi Sektor Riil	Koperasi	Jumlah Koperasi Diberdayakan		35	35		70	terkait langsung dengan masyarakat/stakeholder utama	210,555,000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Dinas Koperasi, UKM
					Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Binaan Koperasi dan Dekranasda	Koperasi	Jumlah Koperasi Diberdayakan		60			60	terkait langsung dengan masyarakat/stakeholder utama	69,320,400		Dinas Koperasi, UKM
	Masih rendahnya volume usaha pelaku usaha kecil	Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha	1.47%	Peningkatan Pelayanan PLUT-KUMKM	Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil Diberdayakan		30			30	terkait langsung dengan masyarakat/stakeholder utama	262,963,616		Dinas Koperasi, UKM
					Penyelenggaraan Pameran/Promosi Produk UKM	Even	Jumlah Even Pameran yang Diselenggarakan	2			1	3	terkait langsung dengan masyarakat/stakeholder utama	160,298,100		Dinas Koperasi, UKM

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI GENERAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2023

No	Sasaran (Berdasarkan Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2023)	Kegiatan Utama Level Mikro (Berdasarkan Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2023)	Kegiatan Utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Indikator KU	Target tahunan 2023	Rencana Aksi (Program Kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat)	Output		Target 2023					Jenis Kegiatan Aksi* (terkait atau tidak terkait langsung dengan masyarakat/stakeholder utama)	Anggaran (Rp)	Pelaksana		
							Satuan	Indikator	TW 1	TW II	TW III	TW IV	Total			Instansi Koordinator	Instansi Pelaksana	
1							7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>SS.1: Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel</b>																		
<b>Indikator SS.1 : Indeks SPBE, Capaian Akuntabilitas Kinerja, Capaian Akuntabilitas Keuangan</b>																		
S.1	Terimplementasinya Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/ Transformasi Organisasi Berbasis Kinerja dan Agile				(Dapat diisi lebih dari 1 rencana aksi/Program/kegiatan)										Biro Organisasi	Biro Organisasi BKD	
S.2	Terimplementasikannya kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN dengan Baik	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN														Biro Organisasi	Biro Organisasi BKD	
S.3	Terimplementasikannya Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional														Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	
S.4	Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi														Dinas Komunikasi dan Informatika	1. Biro Organisasi 2. Dinas Komunikasi dan Informatika 3. Bappeda 4. Inspektorat	
S.5	Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (Digital Services)	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan SPBE pada SKPD		1				1	Terkait langsung dengan masyarakat	16,400,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Seluruh PD
S.6	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja				Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	1 Dokumen	Dokumen Pendukung Pembangunan Zona Integritas di unit kerja		1				1	Terkait langsung dengan masyarakat	-	Inspektorat	Seluruh PD
		Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)				Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	1 Dokumen	Dokumen Pendukung Implementasi SPIP		1				1	Terkait langsung dengan masyarakat	-	Inspektorat	Seluruh PD
		Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat				Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	1 Dokumen	Dokumen Pendukung Pengelolaan Pengaduan Masyarakat		1				1	Terkait langsung dengan masyarakat	-	Inspektorat	Seluruh PD
		Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi				Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	1 Dokumen	Dokumen Pendukung Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi		1				1	Tidak terkait langsung dengan masyarakat	-	Inspektorat	Seluruh PD
S.7	Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik														Biro Hukum		
		Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan														Biro Hukum		

No	Sasaran (Berdasarkan Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2023)	Kegiatan Utama Level Mikro (Berdasarkan Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2023)	Kegiatan Utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Indikator KU	Target tahunan 2023	Rencana Aksi (Program Kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat)	Output		Target 2023					Jenis Kegiatan Aksi* (terkait atau tidak terkait langsung dengan masyarakat/stakeholder utama)	Anggaran (Rp)	Pelaksana		
							Satuan	Indikator	TW 1	TW II	TW III	TW IV	Total			Instansi Koordinator	Instansi Pelaksana	
1			2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
S.8	Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip digital dan data statistik sektoral	Pelaksanaan Arsip Digital														Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
		Pelaksanaan Data Statistik Sektoral														Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
S.9	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan keuangan dan aset	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah				1. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Tugas	25	50	75	100	100	Tidak Terkait langsung dengan masyarakat	228,434,300	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Seluruh PD	
						2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25	50	75	100	100	Tidak Terkait langsung dengan masyarakat	1,320,518,245	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Seluruh PD	
		Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Persentase BMD dalam kondisi baik	25	50	75	100	100	Tidak Terkait langsung dengan masyarakat	182,430,000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Seluruh PD	
<b>SS.2: Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional</b>																		
<b>Indikator SS.2 : Nilai Employer Branding ASN, Indeks BerAKHLAK, Nilai Survei Penilaian Integritas, Nilai Survei Kepuasan Masyarakat</b>																		
S.1	Terwujudnya percepatan transformasi jabatan fungsional	Penataan Jabatan Fungsional														BKD		
S.2	Terselenggaranya manajemen talenta ASN yang efektif dan efisien	Penguatan Manajemen Talenta ASN														BKD BPSDM		
S.3	Terwujudnya percepatan peningkatan kapasitas pegawai ASN	-																
S.4	Terwujudnya rekrutmen pegawai ASN yang efektif dan efisien	-																
S.5	Terwujudnya percepatan transformasi digital manajemen ASN	-																
S.6	Terwujudnya sistem kesejahteraan ASN yang adil, layak, dan berbasis kinerja	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN														BKD		
S.7	Meningkatnya kepatuhan terhadap sistem merit dan sistem	Penguatan Sistem Merit														BKD		
		Pelaksanaan Core Values ASN														Biro Organisasi	1. Biro Organisasi 2. BKD 3. BPSDM	
		Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima					Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	1 Dokumen	Dokumen Pendukung Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	1				1	Terkait langsung dengan masyarakat	-	Biro Organisasi	Seluruh PD